

**Model Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya**

**Muhammad Rizky Akbar<sup>1</sup>, Rindawati<sup>2</sup>, Muzayanah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Surabaya.

Email: [muhrizkyakbar225@gmail.com](mailto:muhrizkyakbar225@gmail.com)

*Received: April 2, 2023; In Revised: April 26, 2023; Accepted: May 14, 2023*

**Abstract**

The focus of this research is to describe the participation model of the Airlangga Village community in the KOTAKU program. This study is important because empirically community participation in the Airlangga sub-district has been going well and is sustainable in protecting the environment. It is necessary to study the model and form of participation implemented through the involvement of PUPR, local government, government partners, the private sector and the village community. Examining the internal and external factors that support collaboration, the collaborative model that is designed is expected to be able to contribute suggestions in solving slum areas in other regions. By using a quantitative research approach, this study produced the following data: 1). The form of participation used by 99 respondents was 20% using thoughts, 29% using energy and 22% using expertise and 16% using materials or money. 2). The collaboration model used by the Airlangga sub-district is 4-Key or 4K, namely Institutionalism, Citizen Control, Facilitative Leadership and Communication. 3) Internal factors that influence community participation are age, gender and level of education. On external factors, factors that influence community participation are communication, leadership and the role of the facilitator.

**Keywords:** Model, Community Participation, KOTAKU, Slum Area.

**Pendahuluan**

Sejak tahun 2016, Dirjen Cipta Karya Kementrian PU dan Perumahan Rakyat menginisiasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) untuk menciptakan pembangunan lingkungan permukiman di Indonesia. Pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) berfokus pada penanganan dan perbaikan kawasan kumuh, pencegahan peningkatan kawasan kumuh, pencegahan penurunan kualitas kawasan menjadi kawasan kumuh serta penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). (Pedoman Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), 2016). Tujuan dari program KOTAKU yaitu dapat menjadi salah satu “platform kolaborasi” dengan mengupayakan dalam pengelolaan wilayah kumuh di Indonesia agar dapat teratasi. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan investasi infrastruktur untuk memberikan pelayanan standar minimal daerah secara partisipatif disiapkan, direncanakan dan dilaksanakan secara kerjasama dengan berbagai sektor yang dimulai dari berbagai elemen baik pemerintahan, masyarakat, maupun lembaga/ institusi yang berkepentingan.

Partisipasi masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan program penuntasan permukiman kumuh KOTAKU. Keberhasilan program tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan pemerintah namun juga kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses keberhasilan program. Penelitian diberbagai dunia mendefinsikan beberapa persyaratan keberhasilan perubahan keberlanjutan kota diantaranya: peningkatan kapasitas administrasi perkotaan, penguatan oganisasi berbasis masyarakat, saling bersinergi antar pemangku kepentingan dan memperbaiki perekonomian negara (Romaya dan Rakodi dalam Bolay, 2006). Maka perlunya sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan dukungan penuh dari partisipasi masyarakat. Mulyadi (2009:26-49) mengemukakan bahwa dukungan masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi empat tingkatan, yakni dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan,

pemanfaatan, serta evaluasi.

Berbagai penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam proses penuntasan kawasan kumuh mengungkapkan bahwa : masyarakat hanya terlibat antusias dalam proses pengambilan keputusan (Rohimah, 2019), sedikit menurun pada proses pelaksanaan dan evaluasi (Apriliana, 2020) dan hampir kurang dari 40 % masyarakat yang aktif dan sukarela melibatkan diri dalam proses evaluasi (Bachmid, 2021). Terlepas dari kenyataan di lapangan, partisipasi masyarakat didasari oleh faktor yang menyertainya seperti usia masyarakat, pendidikan masyarakat, jenis pekerjaan, penghasilan, lama tinggal, komunikasi dan kepemimpinan yang ada di wilayah tersebut (Surjono, 2020).

Program KOTAKU dilakukan di 271 wilayah/kota secara nasional termasuk Kota Surabaya. Penentuan kabupaten/kota kawasan kumuh didasarkan pada kriteria karakteristik populasi, luasan lingkungan kumuh, kebutuhan akan akses ke infrastruktur dasar serta keputusan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan manajemen penanganan perumahan dan permukiman kumuh (Pedoman KOTAKU, 2016). Kota Surabaya tercatat memiliki 299,00 Ha kawasan kumuh yang tersebar di 29 titik kelurahan dari 154 kelurahan yang ada. Artinya bahwa terdapat 18% wilayah di Kota Surabaya merupakan kawasan kumuh atau berpotensi kumuh. Dalam proses penuntasan kawasan kumuh di Surabaya ada beberapa kelurahan yang berhasil berkolaborasi dengan pemerintah untuk mencapai target “kawasan Surabaya zero kumuh”, salah satunya adalah Kelurahan Airlangga.

Upaya kelurahan airlangga dalam penuntasan kawasan kumuh melibatkan berbagai sector kepentingan (stakeholder) terkait. Kerjasama antar stakeholder yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dapat diartikan sebagai collaborative governance. Tata kelola kolaboratif adalah tata kelola yang lebih menitikberatkan pada keterlibatan kelompok diluar pemerintahan dalam hal ini pemangku kepentingan dan masyarakat (Sari, 2014). Emerson (2012) menjabarkan tata kelola kolaboratif adalah sebuah manajemen pengambilan keputusan public yang melibatkan berbagai sector baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan bersama, yang jika dikerjakan satu pihak saja maka tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

Teori tata kelola kolaboratif yang menjadi pijakan penelitian ini adalah teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash dimana teori tersebut menyebutkan bahwa pelibatan satu atau beberapa *stakeholder non state* atau para pemangku kepentingan diluar lembaga public dalam proses pengambilan kebijakan kolektif yang bersifat formal, kesepakatan bersama dan *deliberative* dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau program pemerintah (Anshell dan Gash dalam Islamy, 2018:3). Teori ini juga menjelaskan bahwa dalam proses kolaborasi terdapat beberapa elemen penting dalam menentukan keberhasilan program bersama yakni desain kelembagaan, komitmen terhadap proses, evaluasi hasil bersama, dialog tatap muka dan kepemimpinan fasilitatif.

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta dan karakteristik populasi tertentu. Data yang diambil adalah data primer meliputi hasil kuesioner dan observasi serta data sekunder dari dokumentasi RPLP dan Baseline Kelurahan Airlangga. dengan menggunakan rumus slovin, dihasilkan sampel 100 responden. Pengolahan data menggunakan *rating scale* dengan langkah menentukan skor

jawaban, menentukan kelas interval, menentukan *range* partisipasi hingga perhitungan skor skala likert. Hasil prosentase skala likert akan dirumuskan menjadi suatu bagan yang menggambarkan model partisipasi yang digunakan Kelurahan Airlangga dalam proses penuntasan kawasan kumuh.

**Hasil dan Pembahasan**

**1. Gambaran Kekumuhan**

Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Airlangga meliputi RW 08 di seluruh RT dengan luasan permukiman kumuhnya seluas 10.04 Ha berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/143/436.1.2/2015 Tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya.

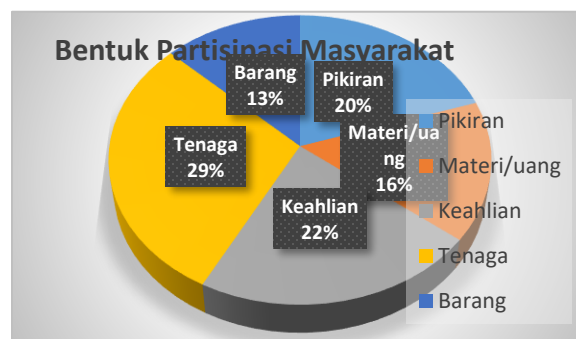
No	Alamat RT/RW	Luas Kumuh (Ha)
1	RT001-RW008	0.98
2	RT002-RW008	0.25
3	RT003-RW008	1.17
4	RT004-RW008	1.04
5	RT005-RW008	1.56
6	RT006-RW008	0.94
7	RT007-RW008	2.6
8	RT008-RW008	1.5

Sumber: Data Baseline Kelurahan Airlangga, 2021

Kepadatan bangunan di Kelurahan Airlangga dapat dikatakan cukup padat di wilayah permukiman. Umumnya sebagian besar wilayah Kelurahan Airlangga merupakan wilayah permukiman dan sarana perniagaan serta lahan yang digunakan untuk pertanian. Wilayah kumuh Kelurahan Airlangga berada di wilayah permukiman yang cukup padat dengan status lahan yang legal.

**2. Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Bentuk Partisipasi Masyarakat terdiri dari pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang, uang dan tidak tahu di Kelurahan Airlangga, bentuk partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Program KOTAKU berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 responden adalah 20% menggunakan pikiran, 29 % menggunakan tenaga dan 22% menggunakan keahlian dan 16% menggunakan materi atau uang.



**Uji Validitas**

<b>Kuesioner</b>	1,2	3	4	5,6	7	X.8
<b>R hitung</b>	0,41	0,51	0,23	0,51	0,23	0,21
<b>R tabel</b>	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
<b>Valid</b>	V	V	V	V	V	V
<b>Kuesioner</b>	9	10	11	12	13	14
<b>R hitung</b>	0,34	0,35	0,21	0,36	0,36	0,34
<b>R tabel</b>	0,197	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
<b>Valid</b>	V	V	V	V	V	V

Sumber: Data Analisis, 2023.

Dapat diketahui hasil validitas pertanyaan lebih besar dari r tabel maka 14 pernyataan dalam kuesioner model partisipasi valid dan dapat disimpulkan uji validitas instrument dapat dikatakan layak untuk diuji cobakan.

**Uji Reliabilitas**

<i>Reliability Statistic</i> <i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
0,795	14

Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa variable tersebut dapat dikatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur (Putri, 2015). Berikut hasil uji Reliabilitas menggunakan SPSS 2.2.

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Reliabilitas diatas 0,60. Dari hasil analisis didapatkan nilai hasil Alpha Cronbach sebesar 0,795 sehingga layak dan memenuhi untuk uji coba Reliabilitas.

**3. Tingkatan Model Partisipasi Masyarakat**

Dengan menggunakan skala likert antara Tidak Pernah – Kadang – Sering – Selalu pada setiap pernyataan yang menggambarkan delapan model partisipasi dan menggunakan analisis frekuensi dengan bantuan SPSS 2.2, Jika diketahui sampel penelitian berjumlah 99 responden dan jumlah kelas ada 3, maka dapat diketahui skor minimum 3 dan skor maksimum adalah  $3 \times 99 = 297$ . Maka kelas intervalnya adalah:

$$KI = \frac{(297-99)}{3} = 66$$

Jadi untuk skala penilaian, adalah:

No	Model Partisipasi	Range
1	Manipulasi	186-99
2	Therapi	274-187
3	Informasi	362-275
4	Konsultasi	450-363
5	Penentraman	583-451
6	Kemitraan	671-584
7	Pendelegsian	759-672
8	Kendali Warga	847-760

## MINISTRATE

Dengan menggunakan analisis frekuensi dengan bantuan SPSS 2.2, peneliti memperoleh data sebagai berikut:

Kuisisioner	Skor maksimal	Prosentase	Model Partisipasi
1	396	25%	Non Partisipasi
2,3,	792	37,5%	Partisipasi Ilusi
4,5	792	47%	Partisipasi Kolaborasi
6,7	792	61%	Partisipasi Kolaborasi
8,9	792	85%	Partisipasi Kolaborasi
10,11	792	89%	Partisipasi Kolaborasi
12	396	97%	Partisipasi Kolaborasi
13,14	792	81%	Partisipasi Kolaborasi

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2023.

Dengan menganalisis tabel prosentase dan analisis frekuensi SPSS 2.2 di atas, 11 dari 12 kuesioner menghasilkan kriteria partisipasi kolaborasi dengan keterangan partisipasi tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Airlangga menggunakan pendekatan model partisipasi kolaborasi yakni kemitraan, pendelegasian dan kendali warga dalam program KOTAKU Surabaya.

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Uji Multikolinieritas

Correlations				
		Kendali Warga	Pendelegasian	Kemitraan
Jenis Kelamin	Pearson	-,092	-,081	-,125
	Sig.	,367	,425	,218
	N	99	99	99
Usia	Pearson	,360**	,168	,254*
	Sig.	,009	,097	,011
	N	99	99	99
Tingkat Pendidikan	Pearson	,458**	,373**	,328**
	Sig.	,008	,007	,006
	N	99	99	99
Lama Tinggal	Pearson	,176	-,022	,168
	Sig. (2-tailed)	,075	,827	,096
	N	99	99	99
Komunikasi	Pearson Correlation	,269**	,108	,424**
	Sig. (2-tailed)	,007	,287	,008
	N	99	99	99
Kepemimpinan	Pearson Correlation	,393**	,368**	,230*
	Sig. (2-tailed)	,006	,006	,022
	N	99	99	99
Pekerjaan	Pearson Correlation	,201*	,312**	,200*
	Sig.	,046	,002	,047
	N	99	99	99
Peran Faskel	Pearson	,231*	,182	,069
	Sig.	,021	,072	,497
	N	99	99	99

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

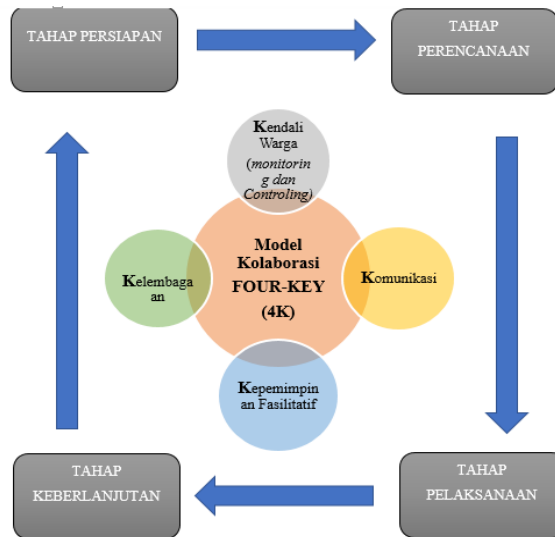
\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pada faktor internal, variabel yang saling berhubungan dengan model partisipasi kolaborasi adalah usia, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan sedangkan variabel lama tinggal dan jenis kelamin tidak memiliki pengaruh atau tidak saling berhubungan dengan tiga model partisipasi

kolaborasi. Pada faktor eksternal, variabel yang saling berhubungan dengan model partisipasi kolaborasi adalah komunikasi, kepemimpinan dan peran fasilitator namun pada faktor peran fasilitator hanya pada model partisipasi pendelegasian yang saling berhubungan.

**5. Model 4-Key Tata Kelola Kolaboratif Kelurahan Airlangga**

Terdapat 14 kuesioner yang mengukur model partisipasi masyarakat, hasil menunjukkan bahwa pada kuisisioner 1 hasil menunjukkan bahwa model partisipasi yang digunakan warga adalah partisipasi ilusi sedangkan sisanya yakni 13 kuesioner menunjukkan hasil model partisipasi kolaborasi dengan tingkat partisipasi tinggi. Model partisipasi kolaboratif yang digunakan di Kelurahan Airlangga dalam penuntasan kawasan kumuh menggunakan teori tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Berikut temuan model kolaborasi yang digunakan Kelurahan Airlangga dalam langkah penuntasan kawasan kumuh melalui program KOTAKU ditinjau dengan teori tata kelola kolaboratif dari Anshell dan Gash (2007):



**Model Kolaborasi FOUR-KEY (4K) Kelurahan Airlangga**

Pada tata kelola kolaboratif penuntasan kumuh Kelurahan Airlangga menggunakan enam elemen dalam pelaksanaan kolaborasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dialog tatap muka selalu dilaksanakan dalam proses penuntasan kawasan kumuh di kelurahan airlangga di setiap kesempatan terlebih pada tahap persiapan. Pada tahap persiapan diadakan Sosialisasi dan membangun komitmen masyarakat Pembentukan/penguatan TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) dengan rincian acara meliputi Sosialisasi pembentukan lembaga, Review keberadaan TIPP, Perekrutan relawan sebagai anggota TIPP, Membentuk TIPP, Meningkatkan kapasitas TIPP serta Menyusun rencana kerja. Pada tahap ini dialog tatap muka dilakukan untuk menjangir aspirasi masyarakat kelurahan airlangga secara real dan detail. Sejalan menurut Anshell dan Gash bahwa dialog tatap muka bukan hanya sebagai sarana negosiasi, tetapi juga menjadi pemecah stereotype dan aspek utama untuk proses membangun kepercayaan, pemahaman bersama serta komitmen dalam menjalin kolaborasi.

### 2. Kelembagaan

Berdasarkan hasil data baseline dan RPLP Kelurahan Airlangga tahun 2016-2021, pelaksanaan penuntasan kawasan kumuh melibatkan berbagai pihak kelembagaan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Surabaya, Balai Prasarana dan Pemukiman, Mitra Pemerintah Kota, Pihak Swasta, Tim Fasilitator Kota, Pemerintah Kelurahan serta seluruh masyarakat Kelurahan Airlangga. Desain kelembagaan yang dibangun dalam model kolaborasi 4K adalah kelembagaan berbasis partisipasi kemitraan dan partisipasi pendelegasian kekuasaan.

### 3. Kepemimpinan Fasilitatif

Anshell dan Gash mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaborasi yang efektif yaitu manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi, pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis dan memastikan bahwa kolaborasi tersebut. Gaya kepemimpinan merupakan proses komunikasi dan cara yang dipergunakan seorang pemimpin di dalam mempengaruhi orang lain sehingga mereka mau mengikutinya dan mengambil manfaat dari interaksi perilaku hubungan dan perilaku tugas yang terjadi antara pemimpin dan pengikutnya. Kapasitas dan kapabilitas pemimpin, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena figur tokoh dan pemimpin saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil data menunjukkan sebanyak 85 responden menjawab baik dan sangat baik figur kepemimpinan pada program penuntasan kawasan kumuh KOTAKU di Kelurahan Airlangga Surabaya.

### 4. Kendali Warga

Kendali warga adalah proses keterlibatan masyarakat kelurahan airkangga secara penuh terhadap segala tahapan program KOTAKU. Kelurahan Airlangga merupakan kelurahan satu-satunya yang tidak hanya berhasil menuntaskan prosentase kawasan kumuh di lingkungannya namun juga mampu membuat program keberlanjutan yakni kelompok pemanfaat dan pemelihara “KPP Airlangga Makmur” sebagai bentuk menjaga kualitas lingkungan. Masyarakat senantiasa berperan aktif dalam setiap proses program KOTAKU, membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat yang menjadi wadah masyarakat dalam menuangkan ide, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi setiap kebijakan pemerintah. BKM Tambak Sejahtera Sejahtera mengawal terhadap realisasi usulan kegiatan dan BKM Tambak Sejahtera berkomitmen akan terus memperbaiki guna mempersiapkan berbagai kemungkinan kebutuhan realisasi kegiatan yang ada. Terutama dari sisi UPK dan kelembagaan atau keaktifan perangkat BKM Tambak Sejahtera sendiri.

Model kolaborasi 4K yang dilakukan oleh Kelurahan Airlangga dalam program KOTAKU sedikit berbeda dengan model kolaborasi tata kelola di berbagai wilayah. Dengan terori tata keloka kolaborasi yang sama, penelitian sebelumnya menghasilkan pengembangan model kolaborasi MAURITS yang mencakup *modern, authority, understanding, review, innovation process, transparency dan sustainable development goals* untuk mewujudkan tujuan kolaborasi pengelolaan sampah modern di DKI Jakarta (Djaenuri, 2018). Penelitian ini menitikberatkan pada actor kolaborasi (SDM) sedangkan pada penelitian ini lebih kepada kelembagaan dan keterlibatan masyarakat secara lebih utuh. Penelitian lain dari Deden Saputra (2020) membahas tentang kolaborasi terori Anshell dan Gash dalam mengelola kampung wisata menghasilkan bahwa Kepemimpinan fasilitatif dan Kelembagaan yang eksklusif menjadi faktor penghambat proses kolaborasi pengembangan kampung wisata Tamansari. Berbeda dengan penelitian peneliti justru kepemimpinan dan kelembagaan menjadi poin penting dan factor pendukung utama dalam partisipasi masyarakat. Model kolaborasi 4K yang di temukan dalam proses kolaborasi

penuntasan kawasan kumuh di Kelurahan Airlangga tidak akan berjalan efektif jika ada ketegasan dalam pengarahannya tanggung jawab partisipasi kemitraan dan pendelegasian kekuasaan. Dengan mengedepankan pada kelembagaan yang sistematis, proses kolaborasi dapat berjalan lancar dengan dibantu komunikasi, control warga dan kepemimpinan yang fasilitatif.

### Kesimpulan

Pada program KOTAKU penuntasan kawasan kumuh, Kelurahan Airlangga menggunakan model pendekatan partisipasi kolaborasi 4K yakni kelembagaan, kendali warga, komunikasi dan kepemimpinan fasilitatif. Pada kelembagaan menggunakan partisipasi kemitraan dan pendelegasian. Model partisipasi kemitraan Kelurahan Airlangga tidak hanya melibatkan pemerintah saja namun melibatkan swasta seperti dalam penanganan persampahan, pihak pemerintah Kelurahan bekerjasama dengan Universitas Airlangga dan dana swadaya masyarakat dalam membantu menyediakan sarana persampahan. Model pendelegasian pada Kelurahan Airlangga tergambar pada Komitmen pemerintah daerah Kelurahan Airlangga daerah penanganan kumuh yakni Realisasi program atau kegiatan dari kabupaten maupun pusat akan diarahkan paling utama di kawasan permukiman kumuh terlebih dahulu. Pada model kolaborasi kendali warga, masyarakat senantiasa berperan aktif dalam setiap proses program KOTAKU, membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat yang menjadi wadah masyarakat dalam menuangkan ide, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi setiap kebijakan pemerintah.

### Daftar Pustaka

- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder Warga Negara Partisipasi*. Retrieved from: <http://lithgow-schmidt.dk/sherryarnstein/ladder-of-citizen-participation.html>
- Arnstein, S. (2011). "A Ladder of Citizen Participation": Journal of the American Institute of Planners (1969). In *The City Reader* (pp. 284-296). Routledge.
- Aca, S., & Hakim, R. (2007). *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Acicis, H., & Aziz, A. (1990). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manulang, M. (1999). *Kesepakatan Konservasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- Bachmid, N. D., Lakat, R. S., & Takumansang, E. D. (2021). Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Program Kotaku di Kota Manado. *Spasial*, 8(1), 48-56.
- Beckman, S. (2004). Mencari Keseimbangan: Pengelolaan Interaksi Antara Masyarakat dan Kawasan Taman Nasional Alas Purwo. *FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Program Acicis*.
- Becker, D. R., Harris, C. C., McLaughlin, W. J., & Nielsen, E. A. (2003). A participatory approach to social impact assessment: the interactive community forum. *Environmental Impact Assessment Review*, 23(3), 367-382.
- Bolay, J. C. (2006). Slums and urban development: Questions on society and globalisation. *The European Journal of Development Research*, 18, 284-298.
- Hakim, R. (2017). Metode Penelitian Tentang Variabel-Variabel Independen. *Journal of Economic Sciences*, 72-92.



- Harvie, M., & Jaques, P. (2003). Public awareness and the environment: "How do we encourage environmentally responsible behaviour?". *Water Science and Technology: Water Supply*, 3(3), 247-254.
- Karim, A. (2018). *Manajemen Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi*. Pati: Kataba Grup.
- Khairudin, & Bruno, L. (2019). Partisipasi Masyarakat. *Psikologi Perkembangan*, 53(9), 1689-1699.
- Lee, M. D. P. (2008). A review of the theories of corporate social responsibility: Its evolutionary path and the road ahead. *International journal of management reviews*, 10(1), 53-73.
- Maresty, K., Astuti, W., & Rini, E. F. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. *Jurnal UNS*, 1(1), 24-33.
- Rafita, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukapura. *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, 369-377.
- Repi, B., & Porajouw, O. (2015). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Melalui PNPM-PPIP Di Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 11(1), 38-50.
- Rindarjono, M. G. (2012). Slum Kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial. *Yogyakarta: Media Perkasa*.
- Rohimah, S., Ilham, M., & Lukman, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Kotaku di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(5), 821-833.
- Slamet, Y. (1993). *Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi*. Sebelas Maret University Press.
- Surat Edaran No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
- Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/ 143/ 436.1.2/ 2015 Tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(1), 7-15.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, Manusia dan Lingkungan*. Jakarta: Djambatan.
- Yolanda. (1998). Partisipasi Petani Dalam Kegiatan PIR Kelapa Sawit. (*Tesis Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor*).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanni, T. T., Hasan, M. J., Azad, A. K., & Bakali, B. (2014). State of the environment in slum area: a case study on Khora slum, Khulna. *Journal of Environmental Science and Natural Resources*, 7(1), 295-304.
- Yulianty, M. (2005). Partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya di pulau penyengat sebagai upaya pelestarian warisan budaya melayu. *Universitas Diponegoro*.